



Original Article

Pemikiran Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo: Fondasi Ideologis Dan Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kontemporer

Agus Rizal^{1✉}, Yudhie Haryono², Yaya Sunaryo³, Dedi Setiadi⁴, Asy'ari Muchtar⁵, Irma Suryani Harahap⁶, Muhammad Haris Zulkarnain⁷, Riskal Arief⁸

¹⁻⁷. Badan Rempah dan Herbal Indonesia.

Correspondence Email: agusrizal.manajemen@gmail.com✉

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo sebagai fondasi ideologis dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, dengan fokus pada konsep trilogi kedaulatan ekonomi: kedaulatan atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah kontribusi teoritis Soemitro terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan relevansinya dalam konteks disrupsi ekonomi digital dan ketergantungan global kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Soemitro menekankan peran strategis negara dalam sektor-sektor penting sebagai upaya mencapai kemandirian dan keadilan ekonomi. Namun, terdapat kesenjangan antara prinsip orisinal tersebut dengan arah kebijakan dalam dekade terakhir yang lebih liberal dan terfokus pada kepentingan pasar global. Penelitian ini merekomendasikan rekontekstualisasi pemikiran Soemitro melalui integrasi pendekatan ekonomi digital, penguatan industri nasional, serta reformulasi kebijakan afirmatif berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, warisan intelektual Soemitro tetap relevan dalam membangun ekonomi Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika global. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi perumusan kebijakan publik berbasis nilai-nilai nasionalisme ekonomi dan kemandirian struktural.

Kata kunci: Soemitro Djojohadikusumo, kedaulatan ekonomi, kemandirian nasional, kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Kemandirian dan kedaulatan ekonomi telah menjadi dua istilah kunci yang

menguat dalam wacana pembangunan nasional, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global, krisis rantai pasok, dan disrupsi geopolitik yang kian sulit diprediksi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kedua konsep tersebut bukan sekadar slogan politis, melainkan kompas ideologis yang menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi?. Kemandirian ekonomi menuntut kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya dan kapasitas produksinya secara internal. Sementara itu, kedaulatan ekonomi menekankan pentingnya otoritas penuh negara atas arah kebijakan pembangunan tanpa dominasi kekuatan asing. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Indonesia, nama Soemitro Djohadikusumo menempati posisi penting sebagai tokoh yang berhasil menggabungkan orientasi teknokratik dengan fondasi ideologis yang kuat.

Soemitro bukan hanya seorang ahli ekonomi, tetapi juga pemikir kebangsaan yang meyakini bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari agenda pembebasan struktural pascakolonial. Baginya, ekonomi adalah alat perjuangan politik, bukan semata-mata instrumen teknis (Djohadikusumo, 1959; Ananta, 2019). Dengan kerangka berpikir ini, ia menegaskan bahwa nasionalisme ekonomi dan kemandirian struktural merupakan syarat utama bagi bangsa yang baru merdeka untuk menegaskan eksistensinya di panggung dunia. Salah satu kontribusi penting Soemitro adalah pendekatan ekonomi dualistik, yakni pengakuan atas keberadaan dua sektor utama dalam ekonomi Indonesia: sektor modern dan sektor tradisional. Ia meyakini bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada industri besar dan modern, melainkan juga harus memberdayakan sektor tradisional—terutama pertanian dan usaha kecil—yang menjadi penyangga kehidupan mayoritas rakyat di pedesaan. Karena itu, Soemitro mendorong penguatan koperasi, pertanian rakyat, dan pembangunan desa sebagai bagian integral dari strategi nasional menuju kemandirian sejati. Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan (Mubyarto, 1997).

Ideologi ekonomi Soemitro terwujud dalam sejumlah prinsip dasar kebijakan publik yang hingga kini tetap relevan, antara lain: intervensi negara dalam sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan keuangan; penguatan industri substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang luar negeri; pembangunan industri dasar nasional seperti baja, pupuk, dan Kimia; proteksi terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui kebijakan fiskal dan regulasi afirmatif.

Namun, tantangan-tantangan yang pernah dikritik Soemitro belum sepenuhnya teratasi dalam dinamika ekonomi kontemporer Indonesia. Surplus perdagangan, misalnya, anjlok ke titik terendah dalam lima tahun terakhir pada April 2025, hanya sebesar USD 160 juta. Ini dipicu oleh lonjakan impor sebesar 21,84% dan stagnasi ekspor (Reuters, 2025). Struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara dan kelapa sawit menunjukkan lemahnya basis industrialisasi nasional.

Tantangan lainnya adalah menyusutnya kelas menengah, dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024 (World Bank, 2024). Penurunan ini bukan hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial. Sementara itu, efisiensi investasi pun menjadi sorotan. Meski nilai Foreign Direct Investment (FDI) mencapai Rp744 triliun pada 2023, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 1,61%—terendah di ASEAN (ERIA, 2024). Tingginya nilai

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) menunjukkan bahwa investasi belum optimal dalam mendorong produktivitas dan nilai tambah.

Dengan latar belakang tantangan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji ulang pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo sebagai basis ideologis dan strategis bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi pustaka, dengan fokus pada teori kedaulatan ekonomi dan penerapannya dalam kebijakan publik kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana ekonomi nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat, berorientasi pada kemandirian struktural, dan sejalan dengan kebutuhan zaman dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo dan relevansinya terhadap kebijakan ekonomi kontemporer. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa karya-karya Soemitro (buku, pidato, artikel), dokumen kebijakan, serta literatur terkait ekonomi politik dan sejarah pemikiran ekonomi Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi dokumen dan analisis konten untuk mengidentifikasi tema dan pola pemikiran. Data kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian naratif, dan interpretasi kritis untuk menghubungkan pemikiran Soemitro dengan isu kemandirian ekonomi saat ini. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan analisis secara mendalam terhadap konteks historis-pemikiran. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang kontribusi pemikiran Soemitro dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional.

Hasil

Pemikiran Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo

Konstruksi pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo terbentuk melalui dinamika sosial-politik Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru. Sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia abad ke-20, Soemitro merumuskan trilogi kedaulatan ekonomi yang terdiri dari tiga pilar: kedaulatan produksi nasional, distribusi dan perdagangan, serta konsumsi. Konsep ini tidak sekadar menjadi kerangka teknis, melainkan sebuah manifestasi nasionalisme ekonomi yang berpadu dengan visi pembangunan jangka panjang. Analisis terhadap trilogi ini dalam konteks ekonomi pascakolonial dan globalisasi mengungkap bagaimana pemikiran Soemitro berhasil menjembatani tantangan struktural negara berkembang dengan cita-cita kemandirian ekonomi.

Dalam hal produksi nasional, Soemitro menekankan pentingnya penguasaan sumber daya alam dan industri domestik sebagai kunci pembebasan dari ketergantungan pada negara maju. Perspektif ini menemukan relevansi historisnya mengingat Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan rempah global sejak abad ke-15. Komoditas seperti cengkeh, pala, dan lada tidak hanya menjadi barang dagangan, tetapi juga alat politik-ekonomi yang memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Sayangnya,

warisan kejayaan rempah ini tidak diikuti oleh penguasaan nilai tambah di era modern. Studi [Saptana dan Susilowati \(2020\)](#) dari Balitbangtan Kementerian Pertanian mengungkap bahwa petani rempah Indonesia hanya menikmati sebagian kecil dari nilai ekonomi komoditas mereka, sementara keuntungan besar diraup oleh eksportir dan pemilik merek asing. Menanggapi hal ini, Soemitro akan mengusulkan kebijakan seperti pembentukan koperasi distribusi nasional dan penguatan BUMN perdagangan untuk melindungi produsen lokal dari ketimpangan rantai pasok global.

Aspek distribusi dalam pemikiran Soemitro tidak terlepas dari kritiknya terhadap sistem yang tidak berpihak pada produsen kecil. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa masalah utama industri rempah Indonesia terletak pada inefisiensi jaringan distribusi, bukan pada kapasitas produksi. Solusi yang ditawarkan Soemitro sejalan dengan mazhab developmentalisme, di mana negara berperan sebagai fasilitator sekaligus pelindung pasar domestik dari distorsi eksternal. Pendekatan ini tercermin dalam gagasannya tentang logistik terintegrasi dan kebijakan yang mendorong pemerataan akses pasar.

Pada ranah konsumsi nasional, pemikiran Soemitro menawarkan strategi untuk mengubah pola pikir masyarakat yang kerap menganggap produk herbal impor lebih unggul. Padahal, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan tradisi pengobatan herbal yang kaya. Menurut [Utami et al. \(2019\)](#) dalam *Journal of Ethnopharmacology*, potensi tanaman obat Indonesia tidak kalah dari negara lain, tetapi masih minim inovasi produk olahan bernilai tinggi. Jika berbasis pada pemikiran ekonomi Soemitro, maka negara akan mendorong revitalisasi industri jamu melalui pendekatan ilmiah, penguatan merek, dan kebijakan afirmatif seperti insentif pajak serta integrasi kurikulum kesehatan berbasis tanaman lokal. Langkah ini bertujuan membangun ekosistem yang mendorong preferensi konsumen terhadap produk domestik.

Trilogi kedaulatan ekonomi Soemitro juga dapat dipahami sebagai varian lokal dari strategi import substitution industrialization (ISI) yang populer di negara berkembang pasca-Perang Dunia II. Namun, berbeda dengan proteksionisme dogmatis, Soemitro mengusulkan keterlibatan dalam ekonomi global dengan posisi setara. Dalam konteks rempah dan herbal, hal ini berarti beralih dari ekspor bahan mentah ke produk olahan bermerek bernilai tambah tinggi. Laporan FAO (2021) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa nilai ekspor rempah negara berkembang bisa melonjak 2-5 kali lipat bila dipasarkan dalam bentuk olahan bersertifikasi. Meski dikritik oleh ekonom liberal sebagai kebijakan yang terlalu protektif, pemikiran Soemitro justru memberikan jawaban atas ketimpangan struktural yang dihadapi negara berkembang dalam sistem perdagangan global. Trilogi kedaulatannya tidak hanya menjadi landasan kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga kerangka operasional untuk sektor strategis seperti industri rempah dan herbal. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar global sekaligus membangun sistem ekonomi yang berakar pada kekuatan lokal, budaya, dan sumber daya alam. Pada akhirnya, warisan pemikiran Soemitro Djojohadikusumo tetap relevan sebagai fondasi menuju ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

Disparitas pemikiran ekonomi Soemitro dengan praktik kebijakan ekonomi dekade

terakhir

Pemikiran ekonomi Soemitro Djohadikusumo telah menjadi landasan penting dalam wacana pembangunan Indonesia sejak era kemerdekaan. Konsep trilogi kedaulatannya—meliputi kedaulatan politik, ekonomi, dan keadilan sosial—menekankan pembangunan berbasis kapasitas nasional, industrialisasi berorientasi sumber daya domestik, serta penguasaan negara atas sektor strategis. Namun, praktik kebijakan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari prinsip-prinsip ini, menciptakan kesenjangan tidak hanya pada tataran konseptual tetapi juga dalam implementasi pembangunan nasional, distribusi kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi.

Soemitro memandang perencanaan ekonomi sebagai alat kunci untuk mentransformasi struktur ekonomi Indonesia dari agraris ke industri, dengan fondasi penguasaan teknologi dan penguatan pasar domestik. Dalam bukunya (1959), ia menegaskan peran sentral negara dalam membongkar struktur ekonomi kolonial yang bersifat eksploitatif dan bergantung pada kekuatan asing. Namun, tren liberalisasi ekonomi belakangan ini justru menggeser peran negara dari pelaku aktif menjadi sekadar fasilitator pasar. Kebijakan investasi yang lebih mengutamakan kemudahan berusaha bagi modal asing, termasuk relaksasi persyaratan alih teknologi, pemanfaatan komponen lokal, dan kepemilikan asing di sektor strategis (Nugroho, 2021), menunjukkan penyimpangan dari visi industrialisasi berbasis kemandirian yang diperjuangkan Soemitro.

Ketimpangan ini semakin nyata ketika meninjau data sektoral. Soemitro menekankan industrialisasi berbasis potensi lokal sebagai solusi ketergantungan pada komoditas primer. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010–2020 mengungkapkan stagnasi bahkan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB, sementara sektor pertambangan dan ekspor bahan mentah tetap menjadi andalan ekonomi (BPS, 2021). Fakta ini mengindikasikan kegagalan transformasi struktural ala Soemitro dan menguatkan tesis bahwa strategi pembangunan saat ini lebih bersifat reaktif terhadap permintaan global ketimbang berorientasi pada penguatan kapasitas domestik.

Kritik Soemitro terhadap ketergantungan struktural pada pihak asing juga menemukan relevansinya dalam konteks kekinian. Gagasannya tentang "kemandirian dalam ketergantungan" (autarky relative)—yakni membangun kekuatan domestik untuk meningkatkan posisi tawar di kancah global—berlawanan dengan tren kebijakan Indonesia yang justru memperdalam ketergantungan pada impor bahan baku industri, utang luar negeri, dan dominasi investor asing dalam proyek infrastruktur strategis. Inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) bahkan menuai kritik karena berpotensi membebani fiskal jangka panjang (Wijayanti & Santosa, 2020). Contoh nyata terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun Soemitro menegaskan pentingnya kendali negara atas sektor pertambangan dan energi untuk kemakmuran rakyat, realitasnya menunjukkan dominasi perusahaan multinasional dalam penguasaan cadangan nikel, batubara, dan emas. Kebijakan hilirisasi tambang yang digulirkan pemerintah pun masih terkendala kapasitas teknologi nasional, ketimpangan kepemilikan infrastruktur pengolahan, dan lemahnya integrasi dengan industri manufaktur domestik

(Sihombing, 2022).

Aspek lain yang mengalami penyimpangan adalah pilar keadilan sosial dalam trilogi Soemitro. Ia menekankan bahwa pembangunan harus diiringi pemerataan hasil dan kesempatan ekonomi, bukan sekadar mengejar pertumbuhan. Kritiknya terhadap ketimpangan struktural peninggalan kolonial diwujudkan dalam advokasinya untuk reformasi agraria dan akses modal bagi UMKM. Namun, data [World Bank \(2022\)](#) menunjukkan indeks Gini Indonesia tetap tinggi (0,38–0,41), sementara konglomerasi terus mendominasi sektor strategis. Program bantuan sosial pemerintah, meski penting, tidak mengubah struktur ekonomi yang timpang. Padahal, Soemitro menekankan pendekatan produktif-transformasional melalui sistem keuangan inklusif dan penguatan industri kecil. Sayangnya, UMKM masih menghadapi kendala perizinan, akses pasar, dan dominasi pelaku besar dalam rantai pasok ([Wulandari & Kassim, 2016](#)).

Merefleksikan pemikiran Soemitro bukan berarti kembali ke masa lalu secara dogmatis, melainkan menghidupkan kembali semangat kedaulatan dan keadilan dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Integrasi prinsip-prinsip nasionalisme ekonominya dengan inovasi kebijakan mutakhir dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan saat ini dan mewujudkan pembangunan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, relevansi pemikiran Soemitro terletak pada kemampuannya memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan ekonomi Indonesia yang kerap terjebak dalam pragmatisme jangka pendek dan ketergantungan struktural pada kekuatan global.

Relevansi Kemandirian Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo dalam Era Digital dan Tata Kelola Global

Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo tentang pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk membangun kemandirian Indonesia di masa pascakolonial. Gagasannya yang menekankan transformasi struktural, penguatan sektor produktif, dan keadilan sosial—melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi—kini kembali menemukan relevansinya dalam konteks disrupsi teknologi, perubahan geopolitik, dan tantangan krisis iklim. Di tengah kompleksitas ekonomi digital dan globalisasi saat ini, pemikiran Soemitro perlu direkontekstualisasi untuk merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan berdaya saing, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan inklusif) dan Target 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur).

Kemandirian ekonomi dalam perspektif Soemitro bukanlah isolasionisme. Ia memahami bahwa integrasi Indonesia dalam tatanan global adalah keniscayaan, tetapi harus dilakukan dari posisi tawar yang kuat berbasis kapasitas domestik. Di era kontemporer, prinsip ini dapat diwujudkan melalui penguasaan teknologi digital dan partisipasi aktif dalam tata kelola global yang inklusif. Ekonomi digital tidak hanya menawarkan peluang pertumbuhan baru, tetapi juga menantang struktur ekonomi konvensional yang tersentralisasi dan rentan terhadap ketimpangan. Untuk merespons tantangan ini, pemikiran Soemitro perlu diaktualisasikan melalui kebijakan seperti Program Banteng Digital—sebuah pendekatan kontemporer yang memadukan

penguatan ekonomi kerakyatan, inovasi teknologi, dan kolaborasi strategis antara negara dan sektor swasta.

Rekontekstualisasi pemikiran Soemitro di era digital menuntut pembaruan instrumen kebijakan. Jika pada 1950–1970-an ekonomi Indonesia bertumpu pada sektor agraris dan ekspor bahan mentah, kini peluang industrialisasi berbasis pengetahuan terbuka lebar melalui ekonomi digital. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2023) memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 150 miliar pada 2025—sebuah potensi besar untuk membangun industri berbasis teknologi dan kreativitas yang selaras dengan SDG Target 9. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan transformasi ini tidak memperlebar kesenjangan, melainkan memperluas partisipasi ekonomi rakyat.

Program Banteng Digital bisa menjadi jembatan antara visi Soemitro dan kebutuhan zaman. Terinspirasi dari Program Kredit Banteng era 1950-an yang memprioritaskan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi pribumi, dalam konteks hari ini, program tersebut dapat diterjemahkan sebagai integrasi antara kebijakan afirmatif terhadap pelaku ekonomi lokal, penguatan literasi dan infrastruktur digital, serta penyediaan ekosistem inovasi berbasis inklusi. Hal ini akan mendorong tercapainya Target SDG 8, yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga mewujudkan SDG Target 8 melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas berbasis inovasi.

Kritik Soemitro terhadap pembangunan yang terobsesi pertumbuhan PDB tanpa pemerataan juga relevan dalam konteks ekonomi digital. Digital divide—kesenjangan akses dan literasi teknologi—menjadi bentuk baru ketimpangan yang mengancam inklusivitas. Kebijakan afirmatif untuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan dalam ekosistem digital menjadi kunci pencapaian SDG Target 8.

Selain itu, visi Soemitro tentang pembangunan berkelanjutan—yang ia suarakan sebelum konsep ini populer—kini harus diterjemahkan ke dalam praktik green industrialization. Di tengah transisi energi dan krisis iklim, industrialisasi tidak lagi bisa mengandalkan model ekstraktif abad ke-20. Sebaliknya, strategi pembangunan harus berbasis energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan circular economy. Hal ini sejalan dengan semangat SDG Target 9 tentang industri berkelanjutan.

Dengan memperhatikan keseluruhan dinamika tersebut, kita bisa menilai bahwa pemikiran Soemitro tetap relevan sebagai fondasi strategis menghadapi disrupsi global. Aktualisasinya melalui Program Banteng Digital dan industrialisasi hijau bukan sekadar penghormatan pada warisan intelektual, melainkan jalan konkret mencapai SDGs dengan prinsip kedaulatan dan keadilan. Dalam konteks ini, Target 8 dan 9 SDGs menjadi tolok ukur sekaligus bukti bahwa kemandirian ekonomi dan inklusivitas bisa berjalan beriringan dalam satu langkah yang strategis, terukur, dan berkeadilan—sesuai dengan semangat Soemitro yang menolak dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan.

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang berlandaskan prinsip kedaulatan nasional tetap menunjukkan relevansi signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi masa kini. Trilogi kedaulatannya—meliputi kedaulatan produksi, distribusi, dan konsumsi—menawarkan kerangka pembangunan yang menempatkan negara sebagai pengarah strategi ekonomi berkeadilan, berdaya saing, dan mandiri dari tekanan eksternal. Analisis dalam kajian ini mengungkap tiga pilar utama pemikiran Soemitro: pertama, peran sentral negara dalam pengaturan sektor strategis; kedua, penguatan industri nasional melalui kebijakan proteksi selektif dan substitusi impor; serta ketiga, pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan sektor tradisional. Ketiga elemen ini dirancang untuk memutus mata rantai ketergantungan struktural sekaligus membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemikiran Soemitro tidak hanya bernilai historis, tetapi mengandung daya transformatif untuk membentuk ekonomi nasional yang berdaulat dan berkeadilan di era disrupsi global. Tantangan terbesar generasi saat ini adalah melakukan reinterpretasi kreatif terhadap warisan intelektual tersebut, mengubahnya menjadi kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan teknologi, geopolitik, dan lingkungan, namun tetap berpijak pada kepentingan nasional. Dalam konteks persaingan ekonomi digital dan transisi energi, prinsip-prinsip Soemitro tentang kedaulatan produksi dapat diwujudkan melalui penguasaan teknologi hijau, sementara konsep kedaulatan distribusi menemukan bentuk barunya dalam penguatan logistik dan pasar digital domestik. Pada akhirnya, nilai abadi dari pemikiran Soemitro terletak pada kemampuannya memberikan kompas strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia—sebuah visi yang menolak dikotomi antara kemandirian dan globalisasi, antara pertumbuhan dan pemerataan. Tugas kita kini adalah menerjemahkan visi tersebut ke dalam langkah-langkah kebijakan yang konkret, progresif, dan berorientasi pada kemakmuran jangka panjang bangsa

Daftar Pustaka

- Amin, S. (2010). *The Law of Worldwide Value*. New York: Monthly Review Press.
- Ananta, A. (2019). *Pemikiran Ekonomi Indonesia: Refleksi Teori dan Praksis*. Jakarta: LP3ES.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Chang, H.-J. (2003). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. London: Anthem Press.
- Djojohadikusumo, S. (1959). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Djojohadikusumo, S. (1961). *Ekonomi Indonesia: Dalam Perspektif Nasional*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Djojohadikusumo, S. (1970). *Dasar-dasar Politik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dos Santos, T. (1970). The Structure of Dependence. *The American Economic Review*, 60(2), 231–236.
- ERIA. (2024). *Foreign Direct Investment and Productivity in ASEAN 2023 Report*. Jakarta: ERIA Publications.

- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- FAO. (2021). *Global Spices and Medicinal Plants Market Outlook*. Rome: FAO.
- Fauzan, R., Harsono, K., Meisandy, R. P., Barokah, M., & Muhaimin, M. I. (2024). Optimising Human Resource Management as an Effort to Improve Employee Performance through Digital Attendance. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 16-25.
- Gereffi, G. (2018). *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2014). *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto*. London: Routledge.
- Hidayat, R. (2021). Nasionalisme Ekonomi di Era Globalisasi: Telaah Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 10(2), 112–130.
- Hirschman, A. O. (2013). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Imran, M. F. (2024). Criminological Examination of Physical and Psychological Violence Committed Against Children in the School Environment. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 41-47.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Stanford: Stanford University Press.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Mkandawire, T. (2015). Neopatrimonialism and the Political Economy of Economic Performance in Africa: Critical Reflections. *World Politics*, 67(3), 563–612.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugroho, H. (2021). Deregulasi Ekonomi dan Tantangan Nasionalisme Ekonomi. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–61.
- Reuters. (2025, April). Indonesia Trade Surplus Shrinks Sharply in April. Retrieved from <https://www.reuters.com>
- Romulo, C. S., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of related party transaction and tax haven utilization on tax avoidance moderated by Country-by-Country reporting. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 26-40.
- Saptana, & Susilowati, S. H. (2020). Tantangan Distribusi Komoditas Pertanian dalam Rantai Nilai Global. *Jurnal Agro Ekonomi*, 38(1), 27–40.
- Sihombing, R. (2022). Hilirisasi dan Dilema Kepemilikan Sumber Daya Mineral di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Energi*, 6(3), 65–78.
- Suryahadi, A., Pritchett, L., & Sumarto, S. (2017). *Improving the Quality of Public Services in Indonesia: Governance and Institutional Reform*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Utami, A., Wulandari, T., & Putra, D. (2019). Indonesian Herbal Medicine and Global Health: A Review. *Journal of Ethnopharmacology*, 245, 112–124.
- Weiss, L. (2014). *America Inc.? Innovation and Enterprise in the National Security State*. Ithaca: Cornell University Press.
- Wijayanti, T., & Santosa, B. (2020). Belt and Road Initiative: Peluang dan Ancaman dalam Perspektif Kedaulatan Ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 155–172.
- World Bank. (2022). Gini Index (World Bank estimate) – Indonesia. Retrieved from

<https://data.worldbank.org>

World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Restoring the Middle Class*. Washington, DC: World Bank Group.

Wulandari, F., & Kassim, S. (2016). Accessibility of Microfinance by Micro Enterprises in Indonesia: A Case of BMTs in East Java. *International Journal of Business and Society*, 17(2), 255–270.